



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PENGUMUMAN NOMOR 356 TAHUN 2024

TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan integritas, serta komitmen tinggi, untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 sejumlah **362 (tiga ratus enam puluh dua) orang pegawai** dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini.

B. PENEMPATAN ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Penempatan unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis meliputi:

1. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
4. Biro Umum;
5. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

II. KRITERIA PELAMAR

1. Tenaga Non ASN Mahkamah Konstitusi yang terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN dan masih aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi;
2. Tenaga Non ASN yang masih aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi paling sedikit telah memasuki tahun ke 2 (dua) secara terus-menerus.



III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota POLRI, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat telah memasuki tahun ke 2 (dua) di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar;
9. Masih aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi pada saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit telah memasuki tahun ke 2 (dua) secara terus-menerus;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
12. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja di Mahkamah Konstitusi.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran PPPK Tenaga Teknis di Mahkamah Konstitusi TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri;
4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis;
5. Bagi tenaga Non ASN Mahkamah Konstitusi **yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN** melakukan pendaftaran sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Pengumuman ini;



6. Bagi tenaga Non ASN Mahkamah Konstitusi **yang tidak terdata dalam pangkalan data (database) BKN** melakukan pendaftaran sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Pengumuman ini;
7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk /Surat Keterangan dari Dukcapil /Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi;
 - c. Surat Pernyataan 5 Poin (sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman) yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai;
 - d. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - e. Ijazah asli dan/atau surat keterangan perubahan data ijazah dari Instansi yang berwenang. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Transkrip/Daftar Nilai Ujian Sekolah. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat telah memasuki tahun ke 2 (dua) di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar;
 - h. Surat keterangan aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit telah memasuki tahun ke 2 (dua) secara terus-menerus.
8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca;
9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Mahkamah Konstitusi TA 2024 meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis;



- b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara
3. Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

VI. SISTEM KELULUSAN

Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik sesuai formasi. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi:

1. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi;
2. Pegawai yang aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi paling sedikit telah memasuki tahun ke 2 (dua) secara terus-menerus.

VII. LAIN-LAIN

1. Pengumuman kelulusan akhir diumumkan melalui laman website *mkri.id*.
2. Tempat pelaksanaan seleksi dilaksanakan di Jakarta.
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai /tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
6. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
7. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
8. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman website *mkri.id*.
9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dapat menghubungi: Tlp. (021) 2352 9000 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Jakarta, 27 September 2024
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Lampiran Pengumuman
 Nomor : 356 Tahun 2024
 Tanggal : 27 September 2024

No	Nama Jabatan	Pendidikan Nama	Alokasi Kebutuhan	Unit Penempatan
1	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	4	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
2	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
3	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 SASTRA RUSIA	1	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO UMUM
4	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA/SMA SEDERAJAT	158	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA, ARSIP DAN EKSPEDISI SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA/SMA SEDERAJAT	101	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO UMUM BAGIAN PENGAMANAN
6	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI	16	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA, ARSIP DAN EKSPEDISI SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
7	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 SYARIAH / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA	1	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA DALAM NEGERI SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
8	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ARKEOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 METEOROLOGI / S-1 SASTRA INDONESIA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERTANIAN	2	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN BAGIAN FASILITAS DAN PELAYANAN TEKNIS PERSIDANGAN SUB BAGIAN PELAYANAN TEKNIS PERSIDANGAN
9	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KEPERAWATAN / S-1 FARMASI / S-1 KEDOKTERAN	3	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUB BAGIAN ADMINISTRASI HAKIM DAN PEGAWAI
10	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAGEMENT	2	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO UMUM BAGIAN PENGAMANAN

No	Nama Jabatan	Pendidikan Nama	Alokasi Kebutuhan	Unit Penempatan
11	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NIAGA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN	1	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL SUB BAGIAN PROTOKOL
12	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 SASTRA INGGRIS	3	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
13	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	8	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA DALAM NEGERI SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
14	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL SUB BAGIAN PROTOKOL
15	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	2	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO UMUM BAGIAN PENGAMANAN
16	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
17	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI / D-III PERHOTELAN	2	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL SUB BAGIAN PROTOKOL
18	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI SUB BAGIAN SEKRETARIAT TETAP AACC
19	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III PERHOTELAN / D-III TEKNIK KOMPUTER	7	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA, ARSIP DAN EKSPEDISI SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
20	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III KEPERAWATAN / D-III KESEHATAN GIGI	8	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUB BAGIAN ADMINISTRASI HAKIM DAN PEGAWAI
21	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	2	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO UMUM BAGIAN PENGAMANAN

No	Nama Jabatan	Pendidikan Nama	Alokasi Kebutuhan	Unit Penempatan
22	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	6	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA, ARSIP DAN EKSPEDISI SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
23	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD/SEDERAJAT	3	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO UMUM BAGIAN PENGAMANAN
24	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD/SEDERAJAT	5	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA, ARSIP DAN EKSPEDISI SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
25	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 SEJARAH / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 SASTRA INDONESIA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 EKONOMI	12	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
26	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III KOMUNIKASI / D-III PENERBITAN / D-III PENYIARAN	4	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
27	PRANANTA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	4	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
28	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI	2	Mahkamah Konstitusi KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MKRI PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan yang dilamar :
Unit penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :
Alamat Email :

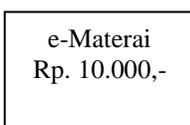
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,



Tanda Tangan

(Nama Lengkap sesuai KTP)

SURAT LAMARAN PPPK TEKNIS

.....,2024

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK MK T.A. 2024

di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) :
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Domisili Saat ini :
Alamat Sesuai KTP :
Nomor HP :
Email :
Pendidikan Terakhir :
Institusi Pendidikan :
Jabatan yang Dilamar :
Unit Penempatan :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
2. Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan dari Dukcapil / Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi;
3. Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai;
4. Ijazah asli dan/atau surat keterangan perubahan data ijazah dari Instansi yang berwenang;
5. Transkrip/Daftar Nilai Ujian Sekolah;
6. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat telah memasuki tahun ke 2 (dua) di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar;
7. Surat keterangan aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi paling sedikit telah memasuki tahun ke 2 (dua) secara terus-menerus.

Demikian surat lamaran ini saya buat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi PPPK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Hormat Saya,

Materai /
e-Materai
10.000

Tanda Tangan

(Nama Lengkap sesuai KTP)

Lampiran IV Pengumuman
Nomor : 356 Tahun 2024
Tanggal : 27 September 2024

**JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK TAHUN 2024
BAGI PELAMAR TENAGA NON ASN YANG TERDATA
DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN**

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5.	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
14.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Lampiran V Pengumuman
Nomor : 356 Tahun 2024
Tanggal : 27 September 2024

**JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK TAHUN 2024
BAGI PELAMAR TENAGA NON ASN
YANG AKTIF BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAH**

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3.	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5.	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6.	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8.	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14.	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025